

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Asyhadie, Zaeni dkk. 2015. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Azhary. 1995. *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*. Jakarta: UI Press
- Bahar, Safroedin. 1998. *Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI*. Jakarta: Sekretariat Negara
- Basah, Sjachran. 2014. *Eksistensi Dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia*. Bandung: PT Alumni
- Budiarjo, Miriam. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsip, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: PT. Bina Ilmu
- Hady, Nurrudin. 2016. *Teori Konstitusi dan Negara Demokrasi*. Malang: Setara Press
- Indrati, Maria Farida. 2007. *Ilmu Perundang-undangan 1*. Yogyakarta: PT Kanisius
- _____. 2007. *Ilmu Perundang-undangan 2*. Yogyakarta: PT Kanisius
- Lopa, Baharuddin dan Andy Hamzah. 1991. *Mengenal Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika
- Mahkamah Agung RI. 2011. *Perkembangan Peradilan Tata Usaha Negara Dan Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara Dilihat Dari Beberapa Sudut Pandang*. Jakarta: Mahkamah Agung RI
- Manan, Bagir. 2004. *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)*. Yogyakarta: UII Press

- Marbun, S.F. 2015. *Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administratif Di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII
- Martitah dkk. 2018. *PTUN Dalam Optik Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*. Semarang: BPFH Unnes
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenandamedia Group
- Mawardi, Irvan. 2016. *Paradigma Baru PTUN: Respon Peradilan Administrasi terhadap Demokratisasi*. Yogyakarta: Thafa Media
- Muchsan. 1981. *Peradilan Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty
- _____. 2007. *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Nasution, Adnan Buyung, 2011. *Demokrasi Konstitusional*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara
- Ridwan HR. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- _____. 2019. *Urgensi Upaya Administratif Di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press
- Seerden, Rene. 2018. *Comparative Administrative Law: Administrative Law of the European Union, Its Member States and the United States*. United Kingdom: Intersentia
- Simanjuntak, Enrico. 2018. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi & Refleksi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Soehino. 2000. *Asas-Asas Hukum Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Liberty
- Soekanto, Soejono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2007. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Soemardjono, Maria. S.W.. 2019. *Metodelogi Penelitian Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada

Soemitro, Rochmat. 1987. *Peradilan Tata Usaha Negara*. Bandung: PT. Eresco

Supandi. 2016. *Hukum Peradilan Tata Usaha Negara*. Bandung: Alumni

Szente, Zoltan dan Konrad Lachmayer. 2016. *The Principle of Effective Legal Protection in Administrative Law*. London: Routledge

Tanya, Bernard L., dkk. 2013. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing

Tjandra, Riawan. 2009. *Peradilan Tata Usaha Negara: Mendorong Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya

_____. 2010. *Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya

_____. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Sinar Grafika

Wiyono. 2010. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika

B. Jurnal

Hari Sugiharto dan Bagus Oktafian Abrianto, *Upaya Administratif sebagai Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Dalam Sengketa Tata Usaha Negara*, Arena Hukum, Volume 11, Nomor 1, April 2018

Irvan Mawardi, *Kedudukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama (Jo Pasal 51 ayat 3 UU 5/1986) Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*, Jurnal Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2019

Maftuh Effendi, *Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia Suatu Pemikiran Ke Arah Perluasan Kompetensi Pasca Amandemen Kedua Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 3, Nomor 1 Maret 2014

Max Rheinstein dan Francis Deak, 1936, *The Machinery of Law Administration in France and Germany*, University of Pennsylvania Law Review

Putera Astomo, *Eksistensi Peradilan Administrasi Dalam Sistem Negara Hukum Indonesia*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 43 No. 3 Juli 2014

Riawan Tjandra, *Perbandingan Sistem Peradilan Tata Usaha Negara dan Conseil d'etat sebagai Institusi Pengawas Tindakan Hukum Tata Usaha Negara*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No.3 Volume 20, Juli 2013

Ridwan, *Beberapa Catatan tentang Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Jurnal Hukum, No. 20 Vol. 9, Juni 2002

Robinsar Marbun, 2017, *Transformasi Upaya Administratif Dalam Penyelesaian Sengketa Kepegawaian*, Jurnal Yuridis, Volume 4, Nomor 2, Desember 2017

Rusnan, *Konsep Negara Hukum Dalam Hubungan Kekuasaan Freies Ermessen Dalam Welfare State*, Jurnal IUS, Volume II Nomor 4, April 2014

Sodikin, *Paradigma Undang-Undang dengan Konsep Omnibus Law Berkaitan dengan Norma Hukum Yang Berlaku di Indonesia*, Jurnal Rechtvinding, Volume 9 Nomor1, April 2020

Sukardi dan E. Prajwalita Widiati, 2012, *Pendelegasian Pengaturan oleh Undang-Undang Kepada Peraturan Yang Lebih Rendah dan Akibat Hukumnya*, Jurnal Yuridika, Volume 27, No. 2

Umar Dani, *Memahami Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Indonesia : Sistem Unity of Jurisdiction Atau Duality Of Jurisdiction? Sebuah Studi Tentang Struktur dan Karakteristiknya*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 7 Nomor 3, November 2018

C. Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Lainnya

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2006)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3344)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245)

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1753)

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1586)

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762)

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

D. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Nomor: 198/G/2019/PTUN-MDN (sengketa Tata Usaha Negara antara Togar Sirait, seorang Pegawai Negeri Sipil melawan Bupati Deli Serdang)

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 08/G/2015/PTUN-KPG (sengketa Tata Usaha Negara dalam bidang kepegawaian antara Elisabeth Kaka, S.Pd., Huru Dandu Katoda, Drs. Anton Mete Raya, Drs. Yahanis Bulu, Thomas Alfred Edison Tue, Karolus Kodi Bani, Wensoslaus Sedan, S.Pd., M.Si. melawan Bupati Sumba Barat Daya)

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 11/G/2016/PTUN-JKT (sengketa Tata Usaha Negara antara Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) sebagai Penggugat melawan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai Tergugat dan Perkumpulan Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) sebagai Tergugat II Intervensi)

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 74/G/2020/PTUN-JKT (sengketa Tata Usaha Negara antara PT. Putri Mahakam Lestari melawan Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Laut UPP Kelas II Pemenang Pada Biro Layanan Pengadaan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan)

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 8/G/2020/PTUN-JKT (sengketa Tata Usaha Negara dalam bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak, yaitu sengketa antara PT. Bukit Sunur melawan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia)

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 51/G/2019/PTUN-BJM (sengketa Tata Usaha Negara antara PT. Sinaralam Dutaperdana melawan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan)

E. Website

<https://kbbi.web.id/dapat>, diakses pada 17 Desember 2020, pukul 22:46 WIB.

Bernard Schwartz, 1952, *French and Anglo-American Conceptions of Administrative Law*, 6 U Miami L. Rev. 433, hlm. 437-438. Available at : <http://repository.law.miami.edu/umlr/vol6/iss3/9>. Diakses 15 Februari 2021.

F. Lain-lain

Yance Arizona, 2010, *Negara Hukum Bernurani: Gagasan Satjipto Rahardjo tentang Negara Hukum Indonesia*, Kertas Kerja EPISTEMA No. 04/2010,

disampaikan dalam 1st International Indonesia Law Society (IILS) Conference, Senggigi, Lombok, 7-8 Oktober 2010

Keterangan Pemerintah Di Hadapan Sidang Paripurna DPR-RI mengenai RUU-PTUN, Jakarta, 29 April 1986, disampaikan oleh Ismail Saleh, Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

Jawaban Pemerintah Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta, 20 Mei 1986